

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang didalamnya terdapat 34 provinsi dengan potensi serta keadaan tiap-tiap daerah berbeda-beda, dimulai dari keadaan alam, sosial, ekonomi sampai dengan adat istiadat. Sebagian wilayah yang berbatasan dengan perairan laut ataupun biasa disebut area pantai sehingga memiliki potensi yang besar pada pengembangan sektor perikanan, sementara itu wilayah yang lain berlokasi pada dataran tinggi sehingga memiliki potensi yang lebih besar kearah pengembangan area perkebunan. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka dari itu bisa dikatakan unggul dalam sektor pertanian serta perkebunan. Sementara itu wilayah yang lain mempunyai infrastruktur yang tergolong maju sehingga lebih unggul pada sektor industri dan jasa.

Pulau Jawa adalah salah satu dari ribuan pulau yang berlokasi di Negara Indonesia. Pulau Jawa sendiri memiliki populasi penduduk berkisar antara 151.593.748 jiwa. Dengan populasi tersebut, jumlah penduduk di Pulau Jawa bisa disebut setengah dari penduduk Indonesia yaitu sebesar 275.361.267 jiwa, dan Pulau Jawa juga termasuk kedalam pulau yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,

Jawa Timur, dan Banten merupakan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Menurut karakteristik sosiologis maupun geografis seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki karakter yang hampir sama, diantaranya dengan predikat pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, setiap provinsi memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia bahkan beberapa kota besar di luar Jawa sekalipun. DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia memegang peranan penting karena sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, konsentrasi penduduk akan mayoritas terarah ke provinsi ini.

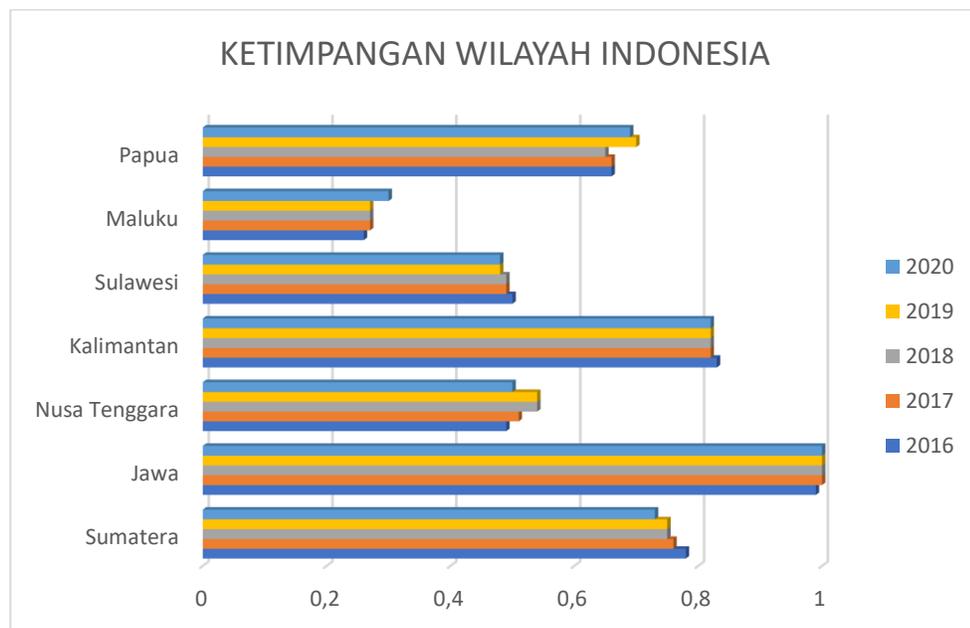
Pembangunan prasana di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan dan lebih cepat dibandingkan wilayah atau kepulauan lainnya sehingga kegiatan di sektor industri dan jasa di Pulau Jawa dapat bertumbuh cepat. Pulau Jawa memiliki potensi yang bisa digunakan sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah tersebut adalah suatu kesempatan bagi daerah-daerah yang bila digunakan dengan cara maksimal dapat menciptakan suatu cara pembangunan yang menguntungkan untuk wilayah beserta masyarakatnya.

Pembangunan negara memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita adalah parameter agar dapat melihat kesejahteraan negara tersebut. Tingkat keberhasilan pembangunan daerah dapat dihitung dari pergerakan pertumbuhan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu wilayah atau

negara menunjukkan peningkatan pada perekonomian suatu negara ataupun wilayah dalam keadaan yang stabil. Namun apabila pertumbuhan suatu negara mengalami penurunan, atau menunjukkan bahwa wilayah tersebut dalam kondisi buruk, maka suatu wilayah menargetkan tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk tujuan pembangunan dan perencanaan wilayahnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk menaikkan taraf hidup, dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita. Pada pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan diikuti oleh perbaikan kondisi di luar arah ekonomi, seperti perubahan struktur dan sikap sosial masyarakat, perbaikan lembaga pemerintah, sikap, dan upaya pengurangan defisit untuk tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.

Saat merencanakan sebuah ruang, aspek ekonomi merupakan elemen penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut secara keseluruhan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui konsekuensi pembangunan fisik. Bukan hanya peningkatan pendapatan, tapi pemerataan. Jika suatu wilayah secara ekonomi tidak beragam secara spasial, maka wilayah tersebut telah menjadi wilayah yang baik. Setiap daerah yang sedang berkembang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin pemerataan kekayaan bagi para penduduk secara luas. Pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi akan lebih baik jika dapat diikuti oleh pemerataan pendapatan ataupun hasil pembangunan. Artinya, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan

oleh berbagai ragam kalangan masyarakat. Ketimpangan wilayah dapat digambarkan dengan menggunakan indeks williamson (IW). Ini dapat dihitung dengan menggunakan PDRB Per kapita serta total populasi. Jika indeks mendekati 0, menandakan tidak ada ketimpangan antar wilayah, dan jika indeks mendekati 1 memiliki arti ketimpangan yang sangat tidak merata.



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.1.

Grafik Indeks Williamson Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen)

Dapat dilihat dari grafik di atas, Pulau Jawa menduduki peringkat pertama pulau dengan tingkat ketimpangan wilayah tertinggi di Indonesia. Ketimpangan antar wilayah merupakan fenomena lumrah yang muncul dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, tiap wilayah umumnya mempunyai wilayah yang relatif maju serta wilayah tertinggal

(Sjafrizal, 2018). Permasalahan ketimpangan sampai saat ini belum dapat teratasi. Selama ini, fokus utama pembangunan daerah nasional merupakan usaha percepatan penurunan ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menekan transformasi serta percepatan pembangunan di area KTI (Kawasan Timur Indonesia). Ketimpangan antar wilayah di Negara Indonesia tidak terlepas dari keberagaman potensi sumber daya alam yang dimiliki, posisi geografis, mutu sumber daya manusia, serta ikatan etnis maupun politik.

Ketimpangan antar wilayah pun bisa menimbulkan ketidakstabilan. Ketimpangan antar wilayah yang berlangsung di Indonesia tidak hanya memunculkan perbedaan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kecemburuan sosial antara wilayah yang tertinggal dengan wilayah yang lebih maju. Kepedulian terhadap upaya penurunan ketimpangan wilayah wajib menjadi prioritas pembangunan. Walaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali, perlu dilakukan upaya guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia saat ini yakni menangani perkara ketimpangan yang tidak hanya terjadi dalam perspektif individu maupun rumah tangga namun juga pada sektor wilayah.

Dapat dilihat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 (9 tahun) adalah waktu yang cukup lama untuk dapat melihat pergerakan ketimpangan wilayah. Pada tahun 2013 sampai dengan 2019 merupakan tahun dimana ketimpangan cenderung stabil. Adapun pergerakan naik atau turun masih dalam batas yang wajar. Berbeda pada tahun 2020, di beberapa provinsi seperti Jawa

Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah terlihat mengalami lonjakan kenaikan ketimpangan yang cukup signifikan sebesar 0,1–0,5 persen dikarenakan adanya wabah covid-19.

Pada tahun 2021 terlihat beberapa provinsi di Pulau Jawa telah terjadi pemulihan pada beberapa sektor yang juga menjadi variabel dalam penelitian ini seperti, PDRB Per kapita, tingkat pengangguran terbuka, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Variabel-variabel tersebut merupakan beberapa indikator yang dapat membantu untuk melihat adanya suatu ketimpangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu.

Adapun dampak positif dari ketimpangan adalah untuk menekan daerah-daerah terabaikan yang mengalami ketimpangan untuk bangkit serta meningkatkan pertumbuhannya. Akan tetapi, dampak negatif dari ketimpangan kerap kali dipandang tidak seimbang. Indikator ketimpangan bisa diukur dengan menggunakan indeks Williamson. Berikut ini merupakan indeks Williamson di Pulau Jawa tahun 2017- 2021:



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

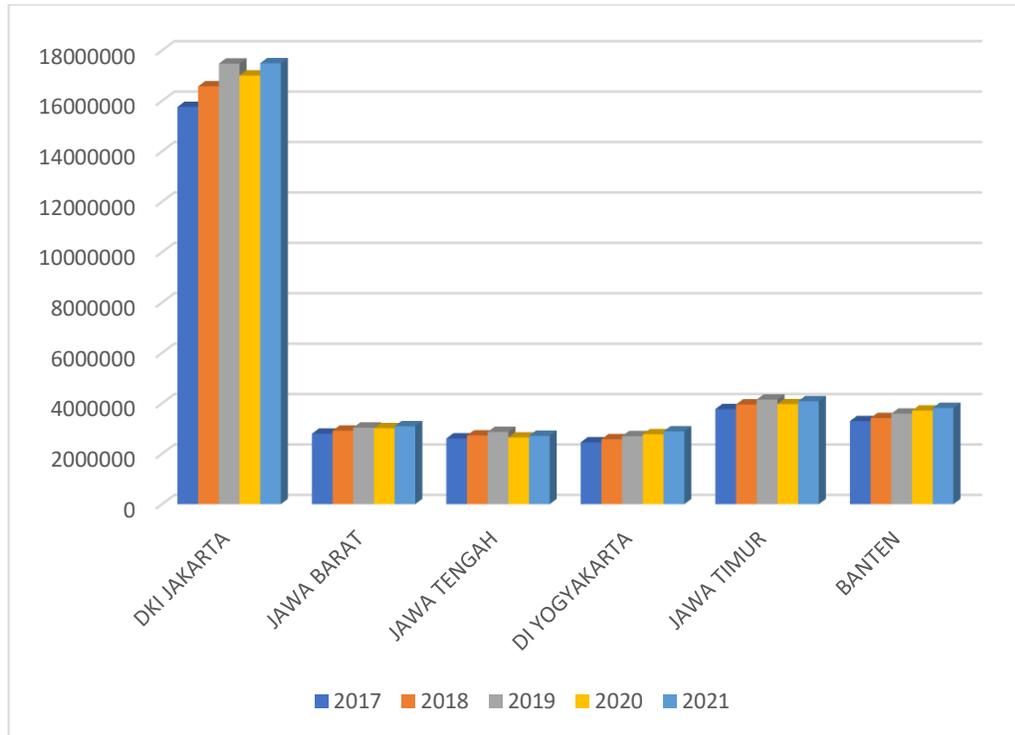
GAMBAR 1.2.

Grafik Indeks Williamson Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Persen)

Indeks Williamson di Pulau Jawa tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur sebesar 0,98 persen. Kedua, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,83 persen. Ketiga, Provinsi Jawa Tengah 0,69 persen. Keempat, Provinsi Banten sebesar 0,64 persen. Kelima, Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,55 persen, dan yang terakhir Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,52 persen. Alasan pemilihan penelitian di Pulau Jawa sendiri lantaran Pulau Jawa merupakan pulau dengan pergerakan pembangunan sarana dan prasarana tercepat dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di negara Indonesia. Ketimpangan wilayah di Pulau Jawa termasuk golongan tinggi karena lebih dari 0,50 persen. Ketimpangan paling rendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dengan indeks Williamson sebesar

0,47 persen. Dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2017-2021, tingkat ketimpangan Pulau Jawa mengalami fluktuasi dan memiliki tingkat ketimpangan yang tergolong tinggi karena angka ketimpangannya masih jauh dari angka 0. Jika hasil Indeks Williamson berada dibawah 1 artinya ketimpangan yang terjadi semakin mendekati tidak merata. Kondisi ketimpangan wilayah tidak bisa dilepas dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan, dan penduduk juga merupakan salah satu penyebab ketimpangan wilayah.

PDRB Per kapita merupakan keseluruhan PDRB dari suatu wilayah ataupun negara yang selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan masyarakat pada wilayah ataupun negara tersebut. PDRB Per kapita merupakan indikator yang dipakai untuk mengenali seberapa besar tingkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, semakin tinggi PDRB Per kapita maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk mengenali tingkatan kesejahteraan masyarakat, PDRB Per kapita pun mempunyai pengaruh pada ketimpangan pendapatan suatu wilayah. PDRB Pulau Jawa sendiri memiliki kontribusi terbesar dan terbanyak kepada PDB Indonesia dibanding kontribusi PDRB pulau yang lain di Indonesia. Dengan demikian, dapat diartikan jika perekonomian di Pulau Jawa mempunyai peranan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia.



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.3.

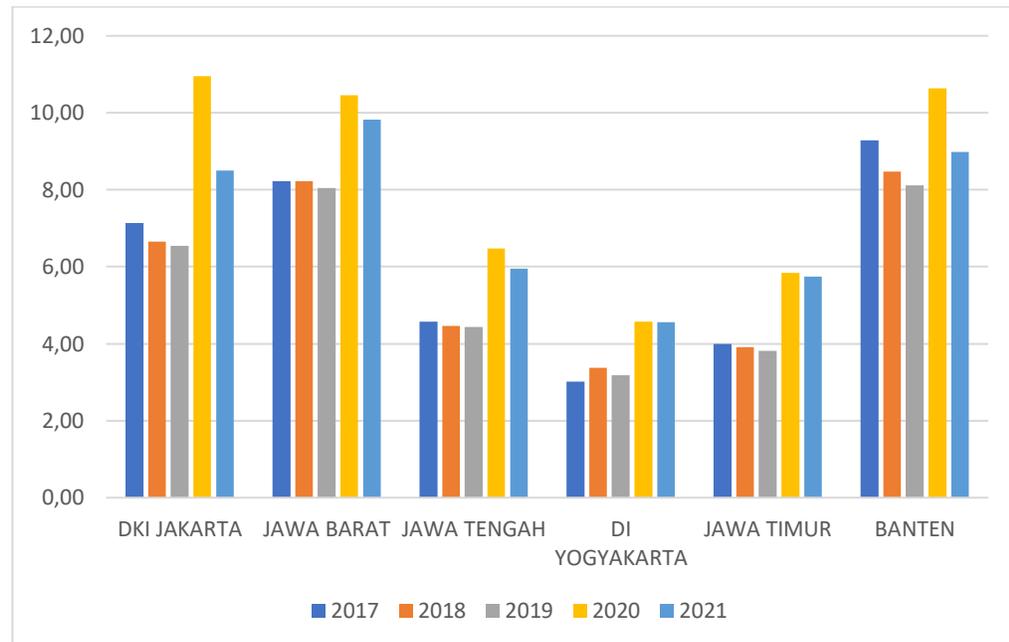
Grafik PDRB Per kapita Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa PDRB Per kapita paling pesat peningkatannya terdapat pada Provinsi DKI Jakarta. Peningkatannya pada tahun 2019 naik sebesar 5,46% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat imbas wabah pandemi covid-19 hingga turun sebanyak -2,7%. Pada tahun 2021 adalah puncak PDRB Per kapita tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.496.298. Sedangkan PDRB Per kapita dengan persentase kenaikan terendah di pegang oleh Provinsi DI Yogyakarta, pada tahun 2013

menyentuh angka Rp 2.453.380, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 mencapai angka Rp 28.901,58.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusica (2018) dengan hasil variabel PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Zega dkk., (2022) memiliki hasil bahwa PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Zahara dkk., (2021), dan Juliana & Soelistyo (2019) memiliki hasil bahwa PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah pada Provinsi Banten. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Penelitian oleh Rahmawati & Yuniarti (2020) memiliki hasil PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Akai dkk., (2009) mengemukakan GDP Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Camagni dkk., (2020) menyatakan GDP Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olabu & Olilingo (2022) dengan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Refqi & Hidayat (2019) memiliki hasil PDRB Per kapita berpengaruh positif dan signifikan.



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

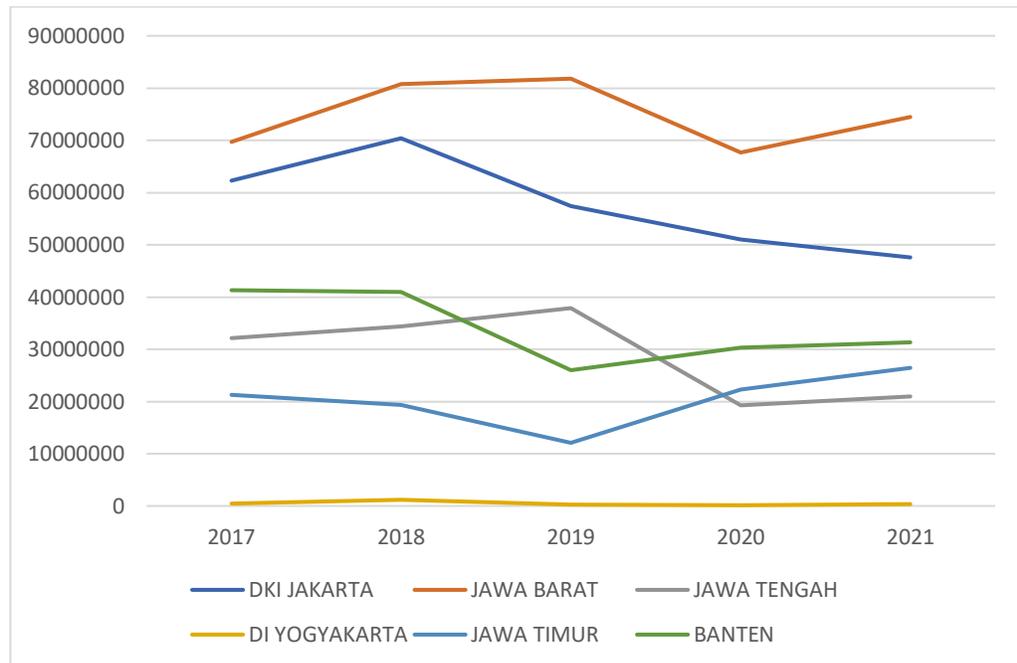
GAMBAR 1.4.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2017-2021(Persen)

Dapat diamati dari gambar di atas, tingkat pengangguran terbesar berada pada Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 10,95 persen. Hal ini disebabkan karena DKI Jakarta memiliki sangat banyak area industri yang dapat mempekerjakan banyak orang, tetapi tidak seluruh pekerjaannya berdomisili sebagai masyarakat DKI Jakarta seutuhnya. Banyak para pekerja yang berdomisili dari luar wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ikut menyasar untuk bekerja di area DKI Jakarta. Dengan hal tersebut, sebenarnya akan berdampak pada jumlah persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan tenaga lokal tergeserkan.

Sebenarnya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah dapat membantu menurunkan tingkat produktivitas dan dapat membantu penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, hal tersebut berakibat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zusanti dkk., (2018) dengan hasil variabel tingkat pengangguran terbuka berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Pulau Jawa. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yusica (2018) memiliki hasil tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya apabila tingkat pengangguran naik sebesar 1% maka ketimpangan wilayah akan naik sebesar 0,144237 atau 14,4237%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan tingkat pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan wilayah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu ketimpangan yang tidak kalah pentingnya pada suatu daerah adalah karena adanya pengangguran, dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan ketimpangan suatu wilayah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaludin dkk., (2019), tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Penelitian oleh Rahmawati dan Yuniarti (2020) memiliki hasil tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Akai dkk., (2009) mengemukakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan.



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.5.

Grafik Investasi (PMA+PMDN) Pulau Jawa 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Dapat dilihat pada grafik di atas, investasi di Pulau Jawa cenderung mengalami kenaikan walaupun terkadang juga mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Jumlah investasi tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp86.854.412,2, kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.393.451,1, selanjutnya Provinsi Banten dengan nilai investasi sebesar Rp40.960.768,9, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp37.873.857,9, selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Rp35.811.442,8 dan yang terkecil adalah pada Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar Rp1.229.496,9.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Islami & Nugroho (2018) memiliki hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk., (2021) memiliki hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Andiaskiton (2019) memiliki hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan Didia (2016) mengemukakan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kedungsepur.

Penelitian Istiqomah (2018) memiliki hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian oleh Mansyur dkk., (2021) mengemukakan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian Maskanudin & Wibowo (2018) memiliki hasil investasi tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Penelitian oleh Syahputra dkk., (2019) memiliki hasil investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Penelitian oleh Refqi & Hidayat (2019) memiliki hasil investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian oleh Syahputra dkk., (2019) memiliki hasil investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Camagni dkk., (2020) memiliki hasil investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan.

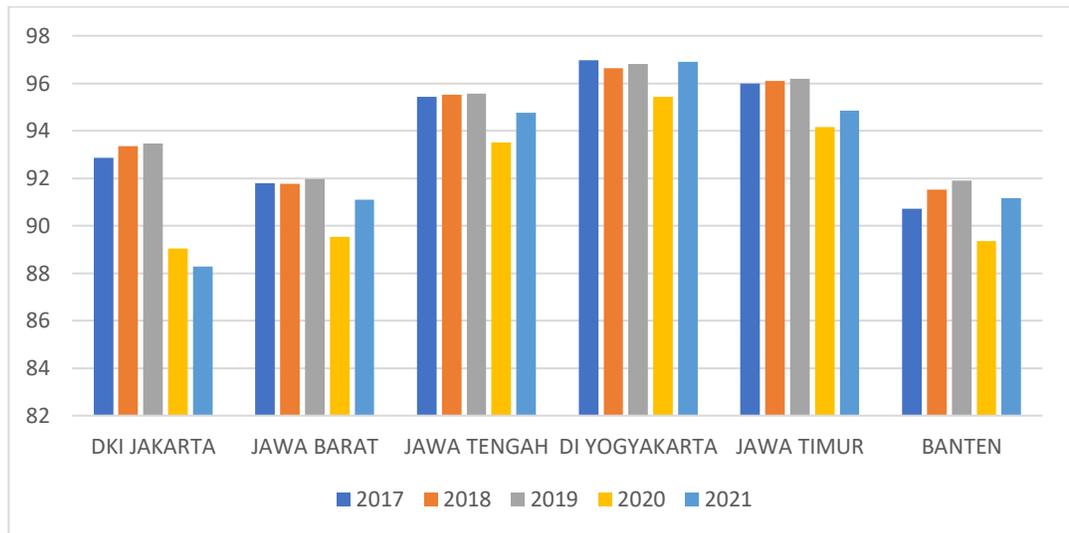
Investasi menurut islam merupakan penganjuran bahwa islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan sebuah investasi, tetapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Islam juga menghimbau untuk segala transaksi berinvestasi yaitu atas dasar suka sama suka, maupun transparan serta didalamnya tidak terdapat unsur pemaksaan. Islam juga mewajibkan tidak adanya unsur judi dan riba terlibat pada investasi tersebut. Seperti yang dijelaskan pada QS. Luqman [31]: 34 berikut:

QS. Luqman [31]: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini memiliki makna, ketika kita bisa mengelola hartanya dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah maka secara tidak langsung PDRB Per kapita, tingkat pengangguran terbuka, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menurunkan ketimpangan wilayah.



Sumber : BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.6.

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pulau Jawa 2017-2021 (Persen)

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat jika tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Jawa cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Setelah tahun 2019, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada Pulau Jawa mengalami penurunan hingga tahun 2021. Adanya angkatan kerja maka akan menjadi salah satu penanda meningkatnya keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jumlah angkatan kerja yang cenderung mengalami penyusutan tidak sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk Pulau Jawa yang selalu mengalami kenaikan, hal ini bisa memunculkan ketimpangan wilayah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Islami & Nugroho (2018) dengan hasil variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Jawa Timur. Selanjutnya penelitian oleh Andiaskiton (2019), Kumar (2020), memiliki hasil negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Penelitian

yang dilakukan oleh Rahman (2015) memiliki hasil tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Penelitian oleh Yusniar (2019) dengan hasil angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya penelitian oleh Maskanudin & Wibowo (2018) memiliki hasil tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan.

Adanya indeks Williamson, PDRB Per kapita, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat membantu untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, sehingga diharapkan dengan adanya beberapa indikator tersebut dapat meringankan adanya ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, agar ketimpangan wilayah di Pulau Jawa dapat diminimalisir, sehingga diharapkan setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki kedudukan yang sama, salah satunya dari sektor perekonomian.

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari jurnal terdahulu yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi, yang ditulis oleh (Istiqomah, 2018).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cakupan ruang lingkup yang luas, hal tersebut membuat peneliti menyusun beberapa batasan masalah, dengan harapan pembahasan dapat terfokus sesuai dengan masalah yang telah dirangkai dalam rumusan masalah.

1. Pada penelitian ini, tingkat ketimpangan wilayah yang digambarkan menggunakan indeks Williamson sebagai variabel dependen pada Pulau Jawa, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
2. Terdapat 4 variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. PDRB Per kapita dengan menggunakan jumlah Ribu Rupiah pada setiap tahunnya.
 - b. Tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan persentase kenaikan pengangguran setiap tahunnya.
 - c. Investasi dengan menggunakan jumlah penanaman modal dalam negeri + penanaman modal asing dengan satuan milyar rupiah.
 - d. Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menggunakan persentase kenaikan pada setiap tahunnya.
3. Penelitian ini menggunakan data periode 2013-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Per kapita terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh PDRB Per kapita terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.

4. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.

E. Manfaat Penelitian

1. Pembaca, yaitu sebagai bahan pembandingan serta referensi untuk penelitian terkait dengan riset ini.
2. Peneliti sendiri, yaitu sebagai salah satu upaya agar dapat menerapkan serta mengaplikasikan materi ataupun ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan sebagai referensi dalam menambah ilmu pengetahuan peneliti atau penulis.